

**PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1  
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**DWI WIJAYANTO**

**C100140297**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**DWI WIJAYANTO**

**C100140297**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**(Kuswardani S.H, M.Hum.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Surakarta)**

Oleh:  
**DWI WIJAYANTO**  
C100140297

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

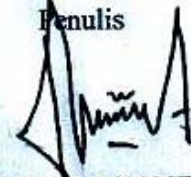
### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dari pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Juli 2018

Penulis



**DWI WIJAYANTO**  
C100140297

**PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Surakarta)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Penegakan Hukum Pidana, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum materiil dan hukum formil dan Putusan hakim dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Hak Anak dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan isi putusan dan jenis data sekunder dengan penelitian yang menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt dan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa implementasi pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum materiil terdapat didalam undang-undang perlindungan anak, implementasi pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum formil atau hukum acara pidana terdapat dalam undang-undang sistem peradilan anak dan Putusan hakim dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Hak Anak dalam penegakan hukum pidana ada hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum yang dilanggar.

**Kata kunci:** *Anak Berhadapan Dengan Hukum, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Anak.*

**Abstract**

This study aims to find out the mainstreaming of children's rights in the enforcement of criminal law, the Implementation of the Mainstreaming of the Rights of the Child (PUHA) in material law and formal law and the judge's decision in implementing the Rights of the Child in criminal law enforcement. This study also includes the type of normative legal research with the method of content decision approach and secondary data type with research using the Decision of Surakarta District Court Number: 04 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Skt dan Number 05 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Skt. The results of this research indicate that the implementation of the mainstreaming of child rights (PUHA) in material law is contained in the law of child protection, the implementation of mainstreaming of child rights (PUHA) in formal law or criminal procedural law is contained in the law of the juvenile justice system and the judges' implementing the Rights of the Child in the enforcement of criminal law there are rights of the child against the law being violated.

**Keywords:** *Children Confronted with the Law, Mainstreaming of the Rights of the Child, Child Protection.*

## 1. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan hak anak yang selanjutnya disingkat PUHA merupakan strategi rasional dan sistematis dalam mewujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Strategi ini dimulai dari perancangan hingga sampai pada monitoring dan evaluasi, yang dimulai dengan rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJMN) 2004–2009. Dari semua matra kehidupan yang berhubungan dengan anak dalam pengarusutamaan hak anak (PUHA) itu penting, termasuk dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum dilihat dari penagakanya terdiri dari tahapan penyusunan hukum (tahap formulasi hukum), tahap penerapan hukum (tahap aplikasi hukum) dan tahap pelaksanaan hukum (tahap eksekusi). Penegakan hukum dari arti luas adalah proses perumusan hukum hingga sampai pada pelaksanaan hukum. Arti sempit penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide hukum dalam kenyataan. Ide-ide hukum adalah substansi hukum yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini hanya dibatasi pada penegakan hukum pada tahap formulasi yaitu pada tahap pembentukan hukum oleh lembaga yang berwenang. Hukum dipenelitian ini juga dibatasi pada hukum yang disebut yaitu dengan undang-undang, dan undang-undang ini dikhususkan pada bidang hukum pidana. Dengan kata lain yaitu pengarusutamaan hak anak (PUHA) dalam kebijakan legislatif di bidang hukum pidana atau pengarusutamaan hak anak (PUHA) dalam undang-undang hukum pidana.

Undang-Undang pidana merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan/ tindak pidana baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Namun penegakan hukum pidana terhadap anak ada pengecualian atau ada perlakuan khusus, mengingat anak adalah *future generation*, sehingga pendidikan, pembinaan merupakan tanggungjawab bersama khususnya orang tua dan Pengarusutamaan hak anak (PUHA) sebagai strateginya bagi negara.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing, hal.14.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tidak hanya melibatkan hukum pidana substantive, melainkan juga berkaitan dengan hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Penanggulangan demikian ini adalah berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai.<sup>2</sup>

Pengarusutamaan hak anak (PUHA) merupakan strategi kebijakan untuk pemenuhan hak anak, dalam faktanya meskipun kebijakan telah dibuat, namun pemenuhan hak anak belum sepenuhnya dipenuhi termasuk orang tua. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian disuatu wilayah desa, di kabupaten sukoharjo bahwa pemenuhan hak anak oleh orang tua terutama bagi mereka yang bekerja, meskipun sebagai pekerja rumahan (*Home Worker*) seringkali terbalik.<sup>3</sup> Hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan individu termasuk anak-anak seharusnya berpijak pula pada Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) baik dalam tahap formulasi sampai pada tahap aplikasinya. Hukum pidana disini memiliki arti luas baik hukum materiil maupun hukum pidana formil.

Kebijakan atau *polity* adalah tindakan pemerintah atau tindakan *legislative*<sup>4</sup>, sedangkan *legislative* secara umum adalah lembaga negara yang berwenang untuk membuat undang-undang, yang di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi kebijakan legislatif adalah tindakan legislative dalam bentuk undang-undang. Dalam penelitian ini undang-undang yang dimaksud adalah undang- undang pidana terutama yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak, maksudnya bahwa undang-undang pidana yang bertujuan untuk melindungi anak yang berpijak pada pengarusutamaan hak anak (PUHA), yaitu beroreintasi pada hak-hak anak.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk mempermudah memahami permasalahan yang akan diteliti maka dapat

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hal 1–3.

<sup>3</sup> Kuswardani, Widoyono, Andria Luhur prakosa, 2016, “*Pekerja Rumahan dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Anak: Studi kasus dipolokarto, sukoharjo*”, dalam Dewi Chandraningrum (ed), *Ekofeminisme IV : Tanah, Air dan Rahim Rumah*, Salatiga: Parahita, hal.219-220.

<sup>4</sup> Henry Campbell Black, 2004, *Black Law Dictionary.*, ST. Paul Minn: West Publishing, hal.1317

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) diimplementasikan dalam hukum pidana (materiil, formil dan pelaksanaan pidana)? 2. Bagaimana Putusan hakim Pengadilan Negeri surakarta dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Hak Anak dalam penegakan hukum pidana?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang belum diketahui orang dan lebih mendalami segala sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Tujuan Objektif: 1. Untuk mengetahui pengarusutamaan hak anak diimplementasikan dalam hukum pidana materiil dan formil. 2. Untuk mengetahui Putusan hakim dalam mengimplementasikan pengarusutamaan hak anak dalam penegakan hukum pidana. *kedua*, Tujuan Subjektif: 1. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar srata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai hak-hak anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut: *pertama*, Manfaat Secara Teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengarusutamaan hak anak dalam penegakan hukum pidana dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembanganya di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya. *Kedua*, Manfaat Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberi gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Di samping itu penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pada umumnya sebab adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait Pengarusutamaan hak anak dalam penegakan hukum pidana.



Kerangka pemikiran mengenai Pengarusutamaan hak anak (PUHA) (Pengarusutamaan Hak Anak - *Mainstreaming Children Rights*) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. Pengarusutamaan hak anak (PUHA) yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin.<sup>5</sup>

## 2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penulisan penelitan ini penulis menggunakan jenis penelitan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder, data sekunder sendiri berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta mengkaji putusan pengadilan nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt dan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi hukum. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis

---

<sup>5</sup> Budi Rahardjo dkk, "*Konsep dan pengertian PUHA*". Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2008, hal.3-4  
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/100458-\[Konten\]-Konten%20C6706.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/100458-[Konten]-Konten%20C6706.pdf) Diunduh 23 maret 2018, pukul 23.23

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 105.

<sup>7</sup> Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, hal.23.

dalam penelitian ini yaitu metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil**

*Pertama*, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum pidana materiil dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu (a) prinsip non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik untuk anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Asas-asas ini lazim disebut dengan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), prinsip ini harus menjadi dasar dalam merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan pidana dalam hukum pidana materiil. Ada penambahan Pasal terutama yang terkait rumusan perbuatan pidana, yaitu dengan menambahkan larangan-larangan perbuatan terhadap anak yang kemudian terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka pelaku dikenai sanksi pidana. Larangan-Larangan tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan sanksi pidana sebagai jaminan terwujudnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditahun 2014 telah mengalami perubahan, di tahun 2016 kembali mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian PERPU ini ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

*Kedua*, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang ini

memberikan kategori anak yang sedang dalam proses peradilan anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini dalam mengimplemetasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) merumuskan tentang restorative justice, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau berkonflik dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan dengan p roses peradilan sebagaimana proses peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Diversi merupakan manifestasi dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang secara langsung atau pun tidak langsung ini juga perwujudan dari prinsip hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, karena anak sebagai pelaku tidak mendapat stigma negative dari masyarakat sehingga psikhis anak bisa tetap tumbuh dan berkembang layaknya anak.

### **3.2 Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Putusan Hakim**

*Pertama*, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Putusan Hakim nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Jodi Setiawan Bin Mugiono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pada putusan tersebut tidak dapat diselesaikan lewat jalur diversi, sehingga dilanjutkan kedalam proses peradilan. Didalam proses peradilan hak-hak anak sudah dipenuhi oleh hakim. Jadi didalam putusan diatas hak-hak anak (terdakwa) sudah diberikan didalam proses persidangan. misalnya saja mendapatkan perlakuan sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum dari advokat dan bantuan lainnya secara efektif, bebas dari hukuman, memperoleh pendampingan dari orangtua/wali dan memperoleh keadilan di muka pengadilan. Hanya saja hak-hak dari anak korban dan anak saksi tidak disebutkan dalam putusan tersebut.

*Kedua*, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Putusan Hakim nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Febri Kristiawan Bin (Alm) Totok Kriswanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pada putusan tersebut tidak dapat diselesaikan lewat jalur diversi, sehingga dilanjutkan kedalam proses peradilan. Didalam proses peradilan hak-hak anak sudah dipenuhi oleh hakim. Didalam putusan tersebut, hakim menganggap sebagai putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak. hanya saja dalam putusan ini menitik beratkan terhadap dakwaan: “Menjatuhkan pidana kepada anak Febri Kristiawan Bin Alm. Totok Kriswanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 dengan ketentuann apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pelatihan kerja.” Sehingga hak-hak anak yang berhubungan dengan hukum dilanggar oleh hakim, karena anakmtersebut dikenakan hukuman penjara atau ditahan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum materiil dan hukum formil sebenarnya sudah cukup baik. Terutama pada Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum materiil, adanya pembaruan peraturan dan munculnya peraturan baru mengenai perlindungan anak yang pada intinya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Sedangkan dalam hukum formil, penjelasan mengenai kategori anak yang berhubungan dan berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan itu sudah

jelas. Hanya saja di hukum formil ini hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum belum terpenuhi.

*Kedua*, Putusan hakim dalam mengimplementasikan Pengarusutaman Hak Anak (PUHA) dalam penegakan hukum pidana sudah cukup baik. Akan tetapi hakim hanya kurang mempertimbangkan hasil laporan dari petugas bapas yang dengan harapan anak tersebut mengakui kesalahannya. Tetapi pada nyatanya hakim hanya melihat dari fakta-fakta yang ada dipersidangan dan melihat perbuatannya saja tanpa harus melihat kondisi anak.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, Para pembuat peraturan diharapkan harus lebih jeli lagi dalam membuat peraturan serta larangan-larangan bagi anak karena dapat membatasi perilaku dan ruang gerak anak sehingga anak dapat mengganggu hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

*Kedua*, Para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan Harus juga mempertimbangkan hasil laporan dari petugas bapas karena ini sangat berkaitan dengan nilai keadilan dari suatu putusan bagi semua pihak.

#### **Persantunan**

Dengan ini Penulis Mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, doa serta dukungan kepada agar menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, dan tidak lupa penulis mempersembahkan skripsi ini kepada almarhum kakak saya Ika Purwanti serta Adik saya Nila Amalia Nabila atas dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan di jenjang perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kuswardani S.H., M.Hum yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, dan terimakasih atas doa, semangat, dukungan serta motivasi buat saudara dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: GentaPublishing, hal.14
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hal 1–3.
- Kuswardani, Widoyono, Andria Luhur prakosa, 2016, “*Pekerja Rumahan dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Anak: Studi kasus dipolokarto, sukoharjo*”, dalam Dewi Chandraningrum (ed), *Ekofeminisme IV : Tanah, Air dan Rahim Rumah*, Salatiga: Parahita, hal.219-220.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) diIndonesia*, , Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.17 dan 22.
- Henry Campbell Black, 2004, *Black Law Dictionary.*, ST. Paul Minn: West Publishing, hal.1317
- Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 105.
- Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, hal.23

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **Jurnal**

- Budi Rahardjo dkk, “*Konsep dan pengertian PUHA*”. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2008, hal.3-4  
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/100458-\[Konten\]-Konten%20C6706.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/100458-[Konten]-Konten%20C6706.pdf) Diunduh 23 maret 2018, pukul 23.23